

Smart Homestay dengan Kearifan Lokal di Desa Wisata Karyamukti

Salsabila Azzahra Kamila^{1*}, Wahyu Prakosa²

¹Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma
Pondok Cina Beji, Depok, Indonesia

²Perumahan dan Pemukiman, Universitas Gunadarma
Pondok Cina Beji, Depok, Indonesia

*Email: pracozo9@gmail.com

Abstrak

Permasalahan *homestay* di Desa Wisata Karyamukti saat ini berkembang dengan kondisi tanpa perencanaan, saat ini *homestay* yang sudah dilakukan ada perencanaan dengan menerapkan *smart homestay* seperti sensor lampu dan sensor di pintu toilet atau kamar mandi. Permasalahannya adalah belum adanya pendekatan yang mempertimbangkan kearifan lokal dan memenuhi tuntutan pengunjung yang sudah memanfaatkan kemajuan teknologi. Pengunjung berperan sebagai peneliti sehingga *homestay* dituntut menggunakan fasilitas teknologi (*smart building*) yang juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di lokasi. Tujuan memperoleh pendekatan desain *smart homestay* yang mempertimbangkan lokalitas dan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau pengunjung. Metode dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membuat gambaran *homestay* di Dusun Gunung Padang yang cenderung berkembang sebagai penyedia bagi peneliti atau pengunjung, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan penerapan teknologi menjadi *smart homestay*.

Kata kunci: Desa Wisata, *Homestay*; Karyamukti; *Smart Home*; *Smart Homestay*

Abstract

The problem of homestay in the Karyamukti Tourism Village is currently developing with conditions without planning, currently the homestay that have been carried out are planning by implementing smart homestay such as light sensors and sensors on the toilet or bathroom door. The problem is that there is no approach that considers local wisdom and meets the demands of visitors who have taken advantage of technological advances. Visitors act as researchers so that homestays are required to use technological facilities (smart building) which also considers local wisdom that exists in the location. The goal is to obtain a smart homestay design approach that considers locality and utilizes technology that suits the needs of users or visitors. The method uses a qualitative descriptive approach by making a description of homestay in Gunung Padang Village which tend to develop as providers for researchers or visitors, taking into account local wisdom and the application of technology to become smart homestay.

Kata kunci: *Tourism Village*; *Homestay*; Karyamukti; *Smart Home*; *Smart Homestay*

Pendahuluan

Indonesia menyumbang PDB Nasional dalam bidang pariwisata sebesar 10 persen dan juga dalam hal devisa sebesar 9,3 persen. Pariwisata budaya dan desa wisata Indonesia cukup dikenal dan masuk ke dalam tiga program Kementerian Pariwisata yaitu desa wisata, akses melalui udara, dan *digital tourism* (Wedatama & Mardiansjah, 2018). Memberikan kualitas pengalaman yang baik dapat meningkatkan daya tarik wisatawan. Pengalaman yang baik dapat diciptakan dengan

pemahaman tentang kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan permintaan (*demand*) (Nurdin Hidayah, 2020). Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan maka disediakan fasilitas *homestay* di desa wisata.

Situs Gunung Padang terletak di wilayah Kabupaten Cianjur tepatnya di Desa Wisata Karyamukti dan memiliki luas sekitar 3132,5 m² (Adiatama, 2019). Situs Gunung Padang dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu gerbang masuk Desa Karyamukti, jalur pendakian yang dibagi menjadi

dua (jalur primer dan jalur sekunder), teras berundak yang terdiri dari lima teras, dan puncak Gunung Padang (Wardani et al., 2019).

Dalam perkembangan setelah menjadi cagar budaya dan meningkatnya kegiatan pariwisata, Situs Gunung Padang dapat mendukung perkembangan sektor ekonomi di dalamnya, seperti UMKM, penginapan, perkemahan, transportasi, dan usaha agraris yang merupakan mata pencaharian sebagian masyarakat di Desa Wisata Karyamukti (Rusata, 2019).

Akibat dari pengembangan Desa Karyamukti menjadi desa wisata, salah satu yang mengalami perubahan adalah penyediaan jasa penginapan di kawasan tersebut. Penginapan ini memanfaatkan beberapa rumah warga yang difungsikan menjadi *homestay*. *Homestay* di Desa Wisata Karyamukti saat ini di antaranya masih ada yang belum memenuhi standarisasi untuk sebuah rumah yang difungsikan menjadi *homestay*. Sehingga *homestay* di Desa Wisata Karyamukti perlu dilakukan penataan kembali.

Berdasarkan *handbook homestay* di mana di dalamnya terdapat panduan pelaksanaan untuk *homestay* di antaranya memiliki dan mengkomunikasikan tata tertib bagi pengguna *homestay*, menyediakan peralatan dan perlengkapan kesehatan, menerima reservasi *homestay* melalui telepon atau media daring lainnya, menyediakan formulir dan pendataan tamu, bangunan rumah tinggal dan sekitarnya harus selalu bersih dan tidak bau, air bersih tercukupi, penggunaan bahan ramah lingkungan, pemanfaatan air dan sumber energi secara efisien, pengolahan sampah dan air limbah yang sehat, serta memastikan kondisi asri dan nyaman pada lingkungan sekitar.

Sedangkan pengertian *Homestay* adalah fasilitas penginapan yang disediakan untuk tempat istirahat wisatawan di daerah wisata dengan memanfaatkan potensi alami untuk kegiatan rekreasi (Nurdin Hidayah, 2020). *Homestay* memberikan *experience* terhadap wisatawan dengan memberikan suasana pendekatan dengan pemilik rumah (Aryasih & Aryanata, 2018). Wisatawan dan pemilik rumah dapat berinteraksi lebih dekat serta wisatawan juga dapat melakukan kegiatan bersama dengan pemilik rumah.

Perubahan gaya hidup dan perkembangan era milenial saat ini memberikan kemudahan dalam mengakses segala sesuatu sangat dibutuhkan

(Mushlihudin, 2021). Salah satunya dengan pemanfaatan perkembangan teknologi saat ini. Dalam hal ini, pemanfaatan teknologi dapat diterapkan dalam fasilitas *smart home*, bagaimana rumah pintar (*smart home*) ini dapat memberikan kemudahan bagi para wisatawan untuk dapat mengakses dengan mudah informasi terkait dengan keberadaan dari rumah pintar tersebut (Ahmadi Julaihi, 2021).

Smart home atau rumah pintar merupakan tempat tinggal atau kediaman yang memanfaatkan perkembangan teknologi yaitu dengan menghubungkan jaringan komunikasi pada fasilitas di dalam rumah seperti peralatan listrik sehingga dapat diakses maupun dikontrol dari jarak jauh (Muslihudin et al., 2018).

Berdasarkan informasi di atas maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai *homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti dan penerapan *smart homestay* pada bangunan *homestay* yang ada.

Metode Penelitian

Desa Wisata Karyamukti terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Di dalam Desa Karyamukti terdapat Situs Megalitikum Gunung Padang, sehingga terdapat beberapa rumah di Wisata pemukiman Desa Karyamukti yang dimanfaatkan sebagai fasilitas wisata *homestay*.

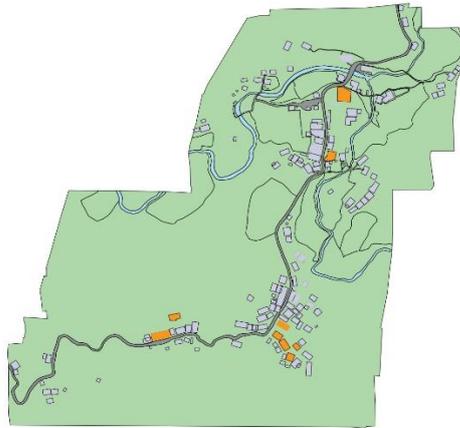


Gambar 1. Lokasi Desa Wisata Karyamukti Gunung Padang

Sumber: Google Earth Pro, 2022

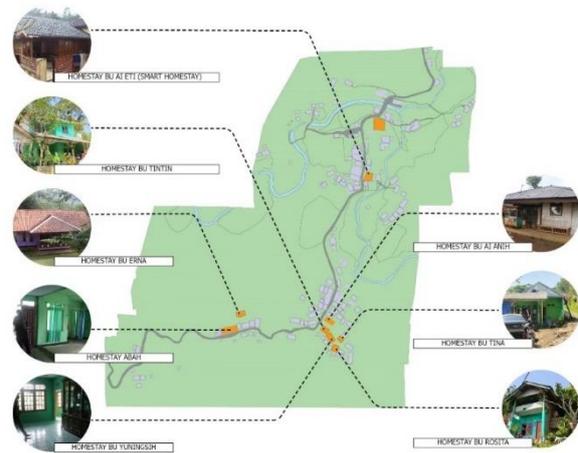
Tahap awal pendataan *homestay* di Desa Wisata Karyamukti dengan melakukan pemetaan terhadap lokasi beradanya bangunan *homestay* di lokasi studi. Pemetaan dilakukan dengan mengambil foto udara menggunakan *drone* yang kemudian hasil dari foto udara tersebut diolah menjadi peta menggunakan aplikasi *drone* deploy. Dari hasil foto udara yang diolah menjadi peta kemudian diolah kembali untuk menjadi peta berbasis geografis dengan menggunakan

software ARCGis dan diolah menjadi gambar dengan format dwg (Autocad). Untuk lebih jelasnya peta lokasi studi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 2. Layout Lokasi *Homestay* ArcGIS
Tahap kedua dilakukan pemetaan terhadap potensi dan permasalahan yang ada di *homestay* dengan melakukan identifikasi pada setiap rumah yang menjadi *homestay*. Adapun hasil survey yang diperoleh dari identifikasi *homestay* di Desa Wisata Karyamukti menghasilkan data informasi seperti penataan *homestay*, pengelolaan

homestay, fasilitas *homestay*, dan kesesuaian *homestay* terhadap standar CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*). Terdapat beberapa rumah warga yang dimanfaatkan sebagai *homestay* dan diantaranya terdapat *homestay* yang menerapkan teknologi *smart home*. Kondisi eksisting dari bangunan *homestay* yang ada di desa karyamukti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. Lokasi dan Eksisting *Homestay*

Tabel 1. Data *Homestay* di Desa Wisata Karyamukti

No	Pemilik	Luas (m ²)	Fasilitas	Jml. Kamar	Kategori
1	Ibu Ai Eti	100	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	1 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Smart Homestay</i>
2	Ibu Ai Anih	73,5	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	1 kamar pengunjung, 2 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>
3	Ibu Yuningsih	87,5	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	3 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>
4	Ibu Ayu Rosita	50	Ruang tamu, ruang sholat, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	1 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>
5	Ibu Tintin	-	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	2 kamar pengunjung	<i>Homestay</i>
6	Ibu Erna	103,36	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	2 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>
7	Abah	95	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama	2 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>

8	Ibu Tina	112,05	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	1 kamar pengunjung, 1 kamar pemilik <i>homestay</i>	<i>Homestay</i>
---	----------	--------	---	---	-----------------

Berdasarkan data tabel di atas, pengelolaan terhadap *homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti masih dikelola secara individual dalam hal ini berarti bahwa pengelolaan *homestay* bersifat pribadi dari pelaku *homestay*. Belum adanya pengelolaan yang terorganisir dari masyarakat pada *homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti menyebabkan pengembangan *homestay* menjadi terkendala.

Fasilitas dari *homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti sendiri masih sangat jauh dari standar *homestay* yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Dimana fasilitas yang seharusnya sudah memadai seperti kemudahan akses pemesanan, pendataan, dan yang paling utama aspek kebersihan sedangkan fasilitas yang terdapat di dalam *homestay* Desa Wisata Karyamukti masih kurang seperti kurangnya kemudahan akses pemesanan, pendataan, dan masih kurang dari standar CHSE.

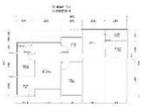
Sudah menjadi suatu kewajiban di desa wisata untuk menerapkan konsep CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*), terutama pada bangunan *homestay* yang ada di desa wisata tersebut. Hal ini tentu saja masih menjadi kewajiban yang harus dapat diterapkan oleh para pelaku *homestay* di desa wisata karyamukti, dikarenakan kondisi *homestay* di Desa Wisata Karyamukti masih sangat jauh dari

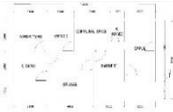
konsep CHSE tersebut. Dari permasalahan yang ada, *homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti masih dapat dikembangkan baik dari segi fisik bangunannya maupun dari segi pengelolaannya.

Berkaitan dengan pengembangan *homestay* di Desa Karyamukti, maka dilakukan identifikasi terhadap bangunan yang menjadi *homestay*. Identifikasi tersebut dilakukan dengan membuat gambar denah dari masing-masing bangunan *homestay*. Hasil akhir yang diharapkan adalah penataan terhadap bangunan *homestay* yang mengikuti kaidah-kaidah peraturan tentang Kemenparkraf.

Menurut Gatot Soetrisno (Dewi et al., 2017), *Homestay* merupakan Rumah tinggal keluarga yang sebagian kamar dan fasilitas pendukungnya disewakan kepada tamu untuk suatu kepentingan yang ada hubungannya dengan integrasi kedua belah pihak, dan bertujuan mencari keuntungan. Pemukiman warga yang dimanfaatkan sebagai *homestay* merupakan salah satu penerapan unsur 3A (Atraksi, Aksesibilitas, dan Amenitas) dalam konsep perkembangan pariwisata yaitu unsur amenitas. Peneliti mendapatkan beberapa data *homestay* yang terdapat di Desa Wisata Karyamukti.

Tabel 2. Data Layout dan Pemilik *Homestay* di Desa Karyamukti

No	Pemilik	Layout	Pengguna	Luas	Renc. Pengembangan
1	Ibu Ai Eti		3 orang menetap (ayah, ibu, anak bungsu) dan 2 orang tidak menetap (anak sulung, anak kedua)	100	Penataan ulang teras, penambahan kamar dan kamar mandi dalam, penambahan ruang santai
2	Ibu Ai Anih		1 orang menetap, 5 orang tidak menetap (ayah bekerja, 4 anak merantau)	73,5	Zona pemilik dan pengunjung dibuat terpisah, penambahan ruang bersama, penambahan kamar dan kamar mandi
3	Ibu Yuningsih		Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	87,5	Gudang dijadikan kamar mandi tambahan

4	Ibu Ayu Rosita		Ruang tamu, ruang sholat, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	50	Kamar tidur 1 dimajukan, penambahan kamar mandi
5	Ibu Tintin	-	Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	-	Tidak ada permintaan untuk penambahan ruang
6	Ibu Erna		Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	103,36	Tidak ada permintaan untuk penambahan ruang
7	Abah		Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama	95	Tidak ada permintaan untuk penambahan ruang
8	Ibu Tina		Ruang tamu, kamar mandi pengunjung, kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang bersama, teras	112,05	Pada bagian lemari luar dijadikan kamat tidur atau <i>walk in closet</i>

Smart homestay adalah konsep *homestay* yang digabung dengan *smart home*. Di Desa Wisata Karyamukti terhadap satu *smart homestay* yaitu *homestay* yang dimiliki oleh Ibu Ai Eti. *Smart homestay* yang ada di Desa Wisata Karyamukti ini, menerapkan sistem *smart home* berupa *smart lock* pada pintu kamar yang disewakan, penggunaan *sensor lamp* pada kamar mandi, dan terdapat penggunaan *scan QR code* untuk mendapatkan data fasilitas dari *smart homestay* ini. Hanya saja penerapan dari *smart homestay* ini belum terfungsikan secara maksimal dikarenakan terkendalanya sistem telekomunikasi yang masih sulit untuk mengakses sinyal di lokasi studi. Gambaran mengenai *smart homestay* yang diterapkan di desa karyamukti dapat dilihat pada Gambar 4.

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada *smart homestay* di Desa Wisata Karyamukti, terlihat jelas bahwa banyak terdapat faktor-faktor penghambat untuk merealisasikan konsep *smart homestay* ini. Belum adanya standarisasi dari



Gambar 4. Fasilitas *Smart Homestay*

homestay yang sudah ada di desa karyamukti, menyebabkan proses untuk menjadikan bangunan *homestay* dapat memenuhi standar seperti yang ditetapkan Kemenparkraf masih membutuhkan tahapan yang panjang. Adanya keterbatasan dari kondisi sosial budaya masyarakat untuk dapat tanggap terhadap teknologi juga masih membutuhkan suatu proses panjang, dan belum adanya fasilitas telekomunikasi yang baik untuk bisa menghadirkan sinyal yang kuat agar aplikasi yang digunakan pada *smart homestay* dapat digunakan dengan baik.

Kesimpulan

Perkembangan Desa Wisata Karyamukti menjadi destinasi wisata yang akan dikembangkan bukan hanya berupa wisata megalitik Gunung Padang saja, maka akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan *homestay* sebagai amenitas dari pariwisata yang ada. Pengembangan *homestay* di Desa Wisata Karyamukti masih memungkinkan untuk direncanakan, dengan keberadaan rumah warga desa yang siap menyambut para wisatawan datang ke lokasi wisata ini, hanya saja keberadaan dari *homestay* ini masih sangat jauh dari *smart homestay*. Untuk menjadikan *homestay* di Desa Wisata Karyamukti menjadi *smart homestay* masih membutuhkan proses yang Panjang dengan melakukan terlebih dahulu pengembangan infrastruktur telekomunikasi dan SDM yang ada di sini.

Daftar Pustaka

- Adiatama, D. (2019). PENGEMBANGAN PRODUK WISATA HERITAGE SITUS MEGALITIK GUNUNG PADANG. *Tourism Scientific Journal*, 4(1).
<https://doi.org/10.32659/tsj.v4i1.47>
- Ahmadi Julaihi, A. (2021). IoT-based Framework for Coordinating Smart Home. *Journal of IT in Asia*, 9(1), 65–70.
<https://doi.org/10.33736/jita.2803.2021>
- Aryasih, P. A., & Aryanata, N. T. (2018). Homestay Dan Budaya: Idealisme Keberadaan Homestay. *Homestay, Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan, February 2018*, 93–102.
- Dewi, N. P. A. P., Paramadhyaksa, I. N. W., & Prajnawrdhi, T. A. (2017). Konsep Tata Kelola Homestay di Desa Wisata Pinge Kabupaten Tabanan. *Mercubuana*, 337, 101–108.
- Mushlihudin. (2021). Smart Home menggunakan Internet of Thing untuk Pengawasan Kesehatan Lansia. *InfoTekJar: Jurnal Nasional Informatika Dan Teknologi Jaringan*, 5(2), 314–317.
- Muslihudin, M., Renvillia, W., Taufiq, Andoyo, A., & Susanto, F. (2018). IMPLEMENTASI APLIKASI RUMAH PINTAR BERBASIS ANDROID DENGAN ARDUINO ROCONTROLLER. 1(2), 22–27.
- Nurdin Hidayah, H. S. (2020). SMARTTOURISM: AKSENTUASI KESIAPAN HOMESTAYDI KAWASAN SMARTTOURISM:

AKSENTUASI KESIAPAN HOMESTAYDI KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG LESUNG, PANDEGLANG - BANTEN. *Media Wisata*, 18(2).

- Rusata, T. (2019). Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Studi Kasus Situs Gunung Padang Cianjur. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 13(2), 79–96.
<https://doi.org/10.47608/jki.v13i22019.79-96>
- Wardani, W. G. W., Wulandari, W., Destiadi, R., & Syahid, S. (2019). REPRESENTASI INTERAKSI MANUSIA DALAM GENRE FOTOGRAFI “STORY” SITUS MEGALITIKUM GUNUNG PADANG. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 3(1), 148–158.
<https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v3i1.3451>
- Wedatama, A. A., & Mardiansjah, F. H. (2018). Pengembangan Homestay Berbasis Masyarakat Pada Kampung Homestay Borobudur. *Jurnal Pengembangan Kota*, 6(2), 135.
<https://doi.org/10.14710/jpk.6.2.135-143>

terhadap kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan pusat kota (Iswanto, 2006)

Shirvani dalam (Suwarlan, 2020) menyatakan bahwa sebuah jalur pedestrian harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain; aman, nyaman, memiliki daya tarik dan ramah terhadap difabel atau orang-orang yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jalur pedestrian sebagai ruang publik, sudah sepatutnya menghindari segala aktivitas dan perilaku spasial lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan mobilitas pejalan kaki. Namun pada kenyataannya, saat ini masih banyak fenomena yang terjadi dimana jalur pedestrian mengalami degradasi fungsi karena adanya penyalahgunaan jalur pedestrian karena perilaku spasial yang mengurangi kenyamanan dan efektifitas ruang pejalan kaki.

Fenomena ini juga terjadi pada koridor Jl. A.A. Gede Ngurah yang menjadi lokus penelitian. Beberapa fenomena yang ditemukan adalah penggunaan jalur pedestrian untuk area berdagang maupun parkir kendaraan. Penyalahgunaan ruang publik pada jalur pedestrian ini mengarah pada perilaku teritorialitas yang ditandai dengan klaim terhadap ruang atau penguasaan ruang untuk tujuan tertentu.

Menurut Edney dalam Indriani (2018) teritorialitas merupakan sesuatu yang berhubungan dengan ruang fisik, penandaan, klaim kepemilikan, upaya pertahanan, personalisasi, identitas serta penggunaan suatu ruang yang eksklusif. Sementara jalur pedestrian sebagai ruang publik harus menjadi area yang ditujukan untuk kepentingan publik dalam hal ini dikhususkan bagi pejalan kaki, sehingga segala upaya penggunaan eksklusif di luar aktivitas pejalan kaki harus dihindari.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi perilaku teritorialitas yang terbentuk pada jalur pedestrian di koridor Jl. A.A. Gede Ngurah. Dengan memahami perilaku teritorialitas yang terbentuk tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan dan dasar pertimbangan dalam perencanaan dan perancangan jalur pedestrian pada Kawasan Bisnis Cakranegara di Kota Mataram maupun jalur pedestrian kota lainnya agar berfungsi sebagaimana mestinya tanpa adanya hambatan serta gangguan apapun sehingga menjadi sarana

pencapaian yang nyaman dan aman bagi mobilitas pejalan kaki.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif untuk memaparkan fakta-fakta yang ada di lapangan, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive*, yakni dengan memilih informan yang mengetahui secara jelas fenomena dan kondisi di lapangan serta latar belakang terbentuknya perilaku spasial di kawasan studi.

Tinjauan Pustaka

Jalur Pedestrian Sebagai Ruang Publik

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hamid Shirvani (Risidian et al., 2020) terdapat 8 elemen pembentuk sebuah kota yang perlu diarahkan dan dikendalikan perancangannya sesuai dengan skenario pembangunan yang direncanakan karena dapat berpengaruh terhadap kualitas ruang kota. Salah satu dari 8 elemen tersebut adalah jalur pedestrian (*pedestrian ways*) atau jalur pejalan kaki. Di Indonesia, umumnya jalur pedestrian lebih dikenal dengan sebutan trotoar.

Huat dalam Purwanto (2014) menjelaskan bahwa ruang publik (*public space*) dapat dibagi menjadi dua berdasarkan lokasinya, yaitu *outdoor public space* dan *indoor public space*. Jalur pedestrian merupakan salah satu contoh dari *outdoor public space* tersebut.

Jalur pedestrian menjadi salah satu bagian dari ruang terbuka publik yang berperan penting dalam sebuah kota untuk mewisadahi kebutuhan aksesibilitas serta mobilitas jarak dekat yang *walkable* (nyaman, aman, mudah bagi pejalan kaki) tanpa adanya gangguan dan halangan (Farida dalam Suwarlan, 2020).

Menurut Shirvani dalam Suwarlan (2020) sebuah jalur pedestrian harus memenuhi syarat, antara lain sebagai berikut:

1. Aman, artinya pejalan kaki harus dapat leluasa bergerak dan terlindungi dari lalu lintas kendaraan
2. Nyaman, artinya pejalan kaki harus terbebas dari berbagai hambatan maupun gangguan oleh apapun yang dapat mengurangi ruang gerak pejalan kaki.

- Memiliki daya tarik, misalnya dengan penambahan elemen-elemen pelengkap pedestrian dan *street furniture*.
- Ramah terhadap difabel, artinya jalur pedestrian juga harus dapat memfasilitasi ruang gerak bagi penyandang disabilitas.

Menurut Ulterman dalam Sari (2014) jalur pejalan kaki harus memenuhi kebutuhan fisiologis dan psikis penggunanya, yaitu:

- Keselamatan, pejalan kaki harus dapat merasa aman dan terlindungi dari kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor maupun permasalahan lainnya yang disebabkan oleh pemilihan material, ketinggian jalur pedestrian dan lain sebagainya.
- Kemudahan, berkaitan dengan kemudahan pencapaian dari suatu tempat ke tempat yang lain tanpa adanya hambatan dan gangguan. Faktor kemudahan pejalan kaki juga dipengaruhi oleh waktu, jarak tempuh, hingga ketersediaan rambu informasi.
- Kesenangan, berkaitan dengan respon emosional pejalan kaki yang muncul akibat pengalaman ruang yang didapat selama perjalanan mencapai tujuan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan daya tarik, kegunaan, hingga desain jalur pedestrian yang dilalui pejalan kaki.
- Kenyamanan, berkaitan dengan kondisi jalur pedestrian yang bebas dari gangguan yang dapat mengganggu serta mengurangi kenyamanan secara fisik dan psikologi pejalan kaki. Termasuk juga dalam hal kelancaran bergerak, ketersediaan tempat untuk beristirahat dan perlindungan terhadap cuaca.

Berdasarkan pemaparan tersebut, para ahli sepakat bahwa keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki harus dijadikan sebagai fokus utama dalam sebuah perancangan sistem pedestrian.

Keberadaan jalur pedestrian di pusat kota dengan aktivitas ekonomi yang tinggi seperti Kawasan Bisnis Cakranegara harus mendapat perhatian khusus karena pada kondisi tersebut, penyalahgunaan jalur pedestrian untuk berbagai kepentingan sangat rentan terjadi. Penyalahgunaan ruang publik dapat memicu berbagai masalah, baik masalah keamanan dan kenyamanan pejalan kaki maupun konflik antar pihak-pihak yang terlibat.

Teritorialitas

Teritorialitas berkaitan dengan teritori, merupakan perwujudan dari perilaku keruangan

sebagai suatu proses individual ataupun proses sosial yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam merespon lingkungan untuk mencapai privasi tertentu (Indriani, 2018)

Menurut (Halim, 2005) teritorialitas mempunyai ciri atau karakteristik yang jelas dan tegas, antara lain; 1) berwujud ruang; 2) dikuasai oleh pihak tertentu; 3) dimiliki dan dikendalikan oleh individu atau kelompok; 4) klaim terhadap ruang tertentu berfungsi untuk memuaskan beberapa kebutuhan; 5) klaim ruang umumnya selalu ditandai, dapat secara konkrit ataupun simbolik; 6) dipertahankan atau setidaknya akan menimbulkan rasa tidak senang dan tenang apabila orang lain memasuki ruang yang dikuasai atau melanggar batas ruang yang ada dengan cara apapun oleh orang asing yang tidak dikehendaki.

Mekanisme kontrol dalam perilaku teritorialitas umumnya berhubungan tentang personalisasi maupun penandaan terhadap klaim ruang tertentu (Altman, 1975) Upaya personalisasi dan penandaan tersebut dapat dinilai dari elemen ruang yang terbentuk, yaitu 1) *fix element*, yang merupakan elemen ruang yang bersifat permanen; 2) *semi fix element*, yaitu elemen yang mudah digeser, dipindahkan dan bersifat tidak permanen; serta 3) *non fix element* yang berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang sifatnya tidak tetap, selalu bergerak dan dinamis (Sativa et al., 2017).

Hubungan antara teritorialitas, privasi dan mekanisme kontrol dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Hubungan teritorialitas, privasi dan kontrol
Sumber: Nur'aini & Ikaputra (2019)

Pada Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa teritorialitas merupakan perilaku dan strategi spasial (keruangan) yang berupa kontrol terhadap suatu objek dengan mekanisme pertahanan (defensif) guna mencapai privasi tertentu.

Menurut Indriani (2018), terbentuknya teritorialitas dapat terjadi karena adanya tekanan lingkungan (*environment press*) yang pada akhirnya memunculkan proses individual dan proses sosial sebagai implementasi hubungan manusia terhadap lingkungannya. Hubungan

antara tekanan lingkungan dan pembentukan teritorialitas dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Hubungan tekanan lingkungan dan teritorialitas
Sumber: Indriani (2018)

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa tekanan lingkungan dapat memicu terjadinya proses individual dan proses sosial yang kemudian menghasilkan respon berupa perilaku spasial. Perilaku spasial yang dapat terbentuk antara lain berupa; ekspansi teritorial, privatisasi ruang publik, serta fenomena dimana sifat ruang privat berubah menjadi publik (dipublikkan) akibat adanya reaksi emosional individu/kelompok masyarakat dalam berbagi maupun memaknai ruang. Setiap perilaku spasial umumnya dilatarbelakangi motif tertentu yang diwujudkan dalam produk fisik dan kemudian menghasilkan sebuah fenomena teritorialitas.

Altman (1975) membagi teritori berdasarkan derajat privasinya, yaitu: 1) teritori primer (bersifat privat); 2) teritori sekunder (bersifat semi privat); dan 3) teritori publik (bersifat publik). Selain Altman, Widjaja dalam Indriani (2018) juga mengklasifikasikan teritori berdasarkan 3 aspek utama yang membentuk teritorialitas, yakni; 1) legalitas (teritori legal); 2) aktivitas (teritori fungsional); dan 3) persepsi (teritori perseptual).

Aspek legalitas berkaitan dengan bukti kepemilikan yang sah (legal) atas suatu tempat atau ruang. Aspek aktivitas berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu dalam teritori fungsional, ruang yang menjadi wadah aktifitas dapat dikatakan sebagai teritori fungsional tidak terikat pada area hak milik atau

bukan hak milik pelaku kegiatan. Selanjutnya aspek persepsi (teritori perseptual) didasari dari adanya suatu kebutuhan dan keinginan oleh individu atau kelompok untuk memiliki dan menguasai suatu ruang untuk kepentingan tertentu.

Teori-teori teritorialitas yang telah dipaparkan tersebut akan menjadi dasar peneliti dalam mengamati dan mengidentifikasi fenomena klaim atau penguasaan ruang publik pada kawasan studi koridor Jl. A.A. Gede Ngurah Kota Mataram

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Teritorialitas di KBC Jl. A.A. Gede Ngurah

Teritorialitas pada umumnya terbentuk karena adanya motif tertentu, baik itu keinginan maupun kebutuhan oleh individu ataupun kelompok. Dari hasil observasi didapatkan bahwa fenomena klaim ruang yang mengarah pada perilaku teritorialitas pada kawasan studi umumnya didominasi oleh pedagang di KBC. Hal ini dapat terjadi karena jalur pedestrian pada koridor Jl. A.A. Gede Ngurah menjadi area transisi antara jalan raya dan pertokoan (area bisnis), seperti yang dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Koridor jalan A.A. Gede Ngurah

Pedagang yang membentuk teritorial ini berasal dari dua sektor, yaitu sektor formal dan sektor informal. Sektor formal adalah pedagang yang memiliki atau menyewa ruko untuk berjualan, namun melakukan ekspansi ruang ke area publik melebihi batas teritorinya. Sementara pedagang sektor informal adalah PKL yang membuka lapak di area selasar pertokoan hingga ke area trotoar (jalur pejalan kaki). Umumnya, area yang dipilih oleh pedagang informal adalah di sekitar area toko yang kosong atau toko yang sedang tidak beroperasi.

Baik pedagang sektor formal dan sektor informal memiliki motif atau alasan tersendiri dalam perilaku spasial yang dilakukan. Dari hasil wawancara, pelaku formal menganggap bahwa

menggelar barang dagangannya (*display*) di luar toko dapat mengundang pembeli untuk datang ke toko tersebut. Beberapa lainnya beralasan bahwa ruang di dalam toko tidak cukup untuk menampung seluruh barang dagangan, sehingga terpaksa harus menata barang dagangan di luar area toko. Selain barang dagangan, pelaku bisnis sektor formal juga memanfaatkan sebagian jalur pedestrian untuk meletakkan tanaman hias, bangku, *banner*, bak cuci tangan dan lain sebagainya.

Masih berdasarkan hasil wawancara, bagi pedagang informal, mengambil ruang publik untuk area dagang bukanlah suatu keinginan tetapi kebutuhan, karena para pedagang tidak memiliki pilihan lain. Keterbatasan modal untuk menyewa toko atau mencari tempat berjualan yang lebih baik menjadi alasan utama pedagang sektor informal untuk menjadikan trotoar sebagai ruang untuk menata barang dagangan. Contoh fenomena ekspansi ruang oleh pedagang sektor informal dapat dilihat pada Gambar 4. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa pelaku dagang sektor formal mengambil lebih dari setengah area jalur pejalan kaki.



Gambar 4. Klaim ruang publik pedagang sektor formal

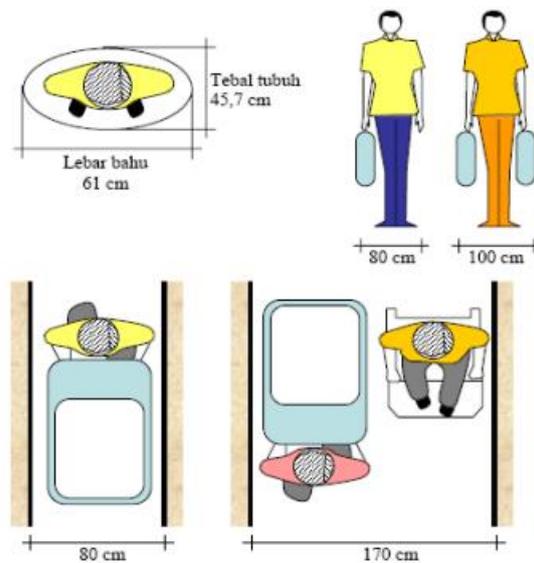


Gambar 5. Klaim ruang publik pedagang sektor informal

Sementara fenomena klaim ruang publik yang dilakukan oleh pedagang informal dapat dilihat

pada gambar 5. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ruang publik (jalur pedestrian) yang dikuasai oleh pedagang cukup besar dan menyisakan ruang gerak hanya untuk 1 orang pejalan kaki. Selain barang dagangan yang ditata sedemikian rupa, umumnya pedagang sektor informal juga menambahkan terpal sebagai kanopi atau peneduh area berjualan. Penambahan kanopi tersebut juga menjadi salah satu indikator penandaan klaim ruang yang mengarah pada perilaku teritorialitas pedagang informal.

Dari dua fenomena yang telah dipaparkan dapat diketahui bahwa ruang sirkulasi yang tersisa untuk pejalan kaki dari klaim ruang publik tersebut hanya berkisar antara 50-75 cm. Sementara ukuran standar untuk 1 orang pejalan kaki membutuhkan sekitar 80-100 cm, kemudian minimal sekitar 170 cm untuk 2 orang pejalan kaki yang saling berpapasan agar dapat bergerak dengan nyaman (Tanan, 2011). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.

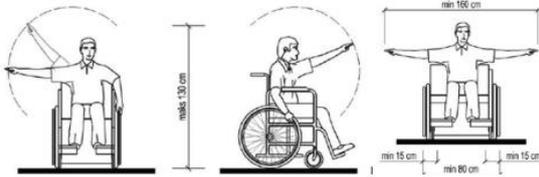


Gambar 6. Standar ukuran pejalan kaki
Sumber: Tanan, 2011

Standar ukuran yang ada pada Gambar 6 merupakan ukuran minimal yang diperuntukan bagi pejalan kaki dengan membawa barang bawaan yang tidak terlalu besar. Mengingat objek studi merupakan kawasan pusat bisnis yang memungkinkan pejalan kaki membawa banyak barang belanjaan, maka kebutuhan terhadap ruang gerak pejalan kaki akan menjadi lebih besar.

Kebutuhan ruang gerak untuk pengguna difabel juga perlu diperhatikan karena kebutuhan ruang geraknya tentu berbeda dengan pejalan kaki

biasa. Contohnya bagi pengguna difabel yang menggunakan kursi roda, membutuhkan setidaknya minimal 130-160 cm (Tanan, 2011), untuk dapat bergerak dengan nyaman, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Standar ukuran untuk difabel
Sumber: Tanan, 2011

Fenomena selanjutnya yang juga terjadi di koridor J. A.A. Gede Ngurah adalah penyalahgunaan jalur pedestrian sebagai area parkir kendaraan bermotor. Pelaku kegiatan ini berasal dari latar belakang yang beragam, antara lain pegawai toko, tukang parkir, pedagang sektor informal (PKL) hingga pengunjung toko. Bagi pengunjung toko, umumnya “klaim ruang publik” untuk parkir kendaraan hanya bersifat sementara, hanya sampai aktivitas berbelanja selesai. Namun bagi pegawai toko, tukang parkir, dan pedagang sektor informal (PKL), durasi klaim ruang cenderung lebih lama. Klaim ruang untuk area parkir ini tidak hanya ditemukan pada jalur pedestrian (trotoar) tetapi juga pada selasar pertokoan. Contoh klaim ruang publik untuk parkir yang terjadi di kawasan studi dapat dilihat pada Gambar 8.

Berdasarkan hasil wawancara, motif pelaku klaim (pegawai toko, tukang parkir, pedagang sektor informal) umumnya didasari keinginan untuk menempatkan kendaraannya di area yang teduh, terhindar dari panas dan hujan mengingat durasi parkir yang cukup lama.

Sementara pengunjung toko memiliki motif yang berbeda-beda, sebagian tidak memiliki motif khusus karena dilakukan secara spontan dimana pengunjung memarkirkan kendaraan di area terdekat dengan *entrance* toko yang ingin dikunjungi. Sebagian lainnya juga mempertimbangkan area yang lebih teduh untuk parkir terutama di siang hari. Ruang pada jalur pedestrian yang dimanfaatkan untuk area parkir menyisakan sekitar 60-75 cm ruang untuk pejalan kaki, besaran ini juga tidak memenuhi standar kebutuhan ruang gerak minimal untuk pejalan kaki.



Gambar 8. Klaim ruang publik untuk parkir

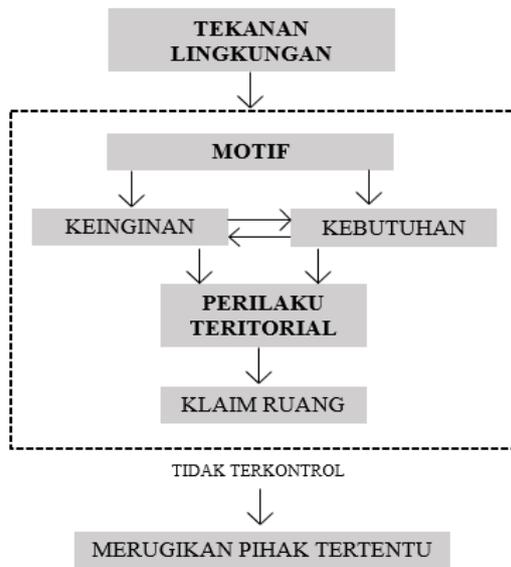
Adanya fenomena klaim ruang publik yang mengambil sebagian dari lebar jalur pedestrian tersebut tentu dapat mengganggu kenyamanan, kemudahan dan keselamatan bagi pengguna jalur pedestrian. Sementara menurut teori yang dikemukakan Shirvani dan Ulterman, ketiga hal tersebut adalah syarat utama dari sebuah jalur pedestrian yang harus dipenuhi.

Pola Teritorialitas yang terbentuk

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diidentifikasi bahwa teritorialitas yang terbentuk pada koridor KBC Jl. A.A. Gede Ngurah Kota Mataram disebabkan adanya tekanan lingkungan (*environment press*) seperti: 1) kurangnya ketersediaan ruang *display* barang dagangan; 2) tidak adanya modal dan lahan khusus yang disediakan pemerintah untuk area PKL; serta 3) tidak tersedianya area parkir yang mampu melindungi kendaraan dari panas dan hujan. Tekanan lingkungan tersebut kemudian memunculkan kebutuhan dan keinginan dengan latar belakang motif yang berbeda-beda seperti pada paparan sebelumnya. Hal ini kemudian memunculkan suatu perilaku teritorial, yang menyangkut klaim terhadap ruang publik.

Pada dasarnya, antara kebutuhan dan keinginan harus seimbang dalam membentuk perilaku

teritorial agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu. Perilaku teritorial dikatakan merugikan apabila tidak terkontrol dan merugikan aktivitas lain yang ada disekitarnya (Gambar 9). Dalam fenomena teritorialitas yang terjadi di KBC Jl. A.A. Gede Ngurah Kota Mataram ini, klaim terhadap ruang publik tidak terkontrol dan jelas sangat merugikan bagi aktivitas pejalan kaki. Adanya perilaku tersebut menyebabkan ruang gerak bagi pejalan kaki sangat terbatas dan tidak memenuhi persyaratan standar yang ditentukan untuk jalur pedestrian.

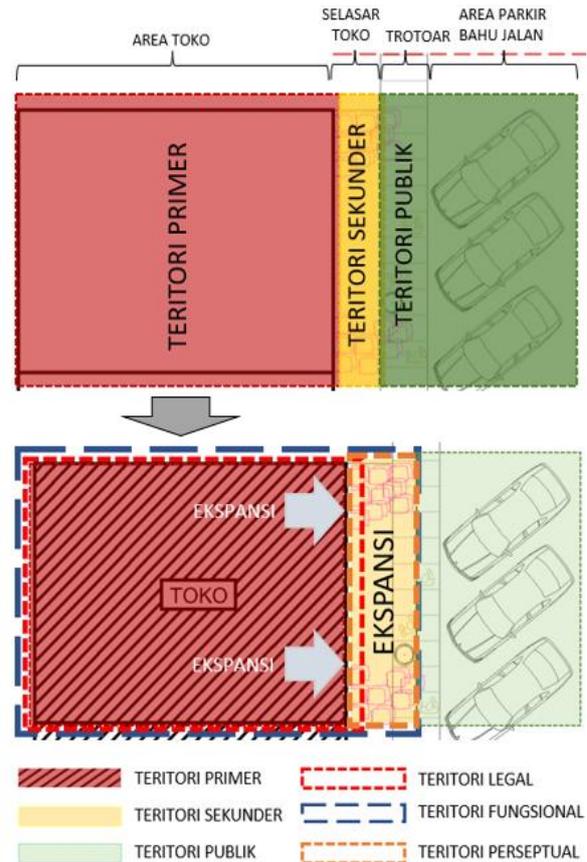


Gambar 9. Diagram perilaku teritorialitas koridor KBC

Selain mengurangi ruang gerak bagi pejalan kaki, perilaku teritorialitas tersebut juga memberikan citra dan persepsi negatif terhadap ruang kota. Penataan yang tidak terkontrol menyebabkan tampilan koridor KBC mengurangi *value* kawasan secara visual dan fungsional. Secara umum, perilaku teritorialitas yang terjadi di kawasan studi dapat digambarkan dalam diagram pada Gambar 9.

Teritorialitas yang terbentuk di koridor KBC memiliki beberapa pola yang berbeda. Pola yang pertama adalah adanya ekspansi teritorial oleh pedagang sektor formal pada area diluar teritorialnya yang dapat dilihat pada Gambar 10.

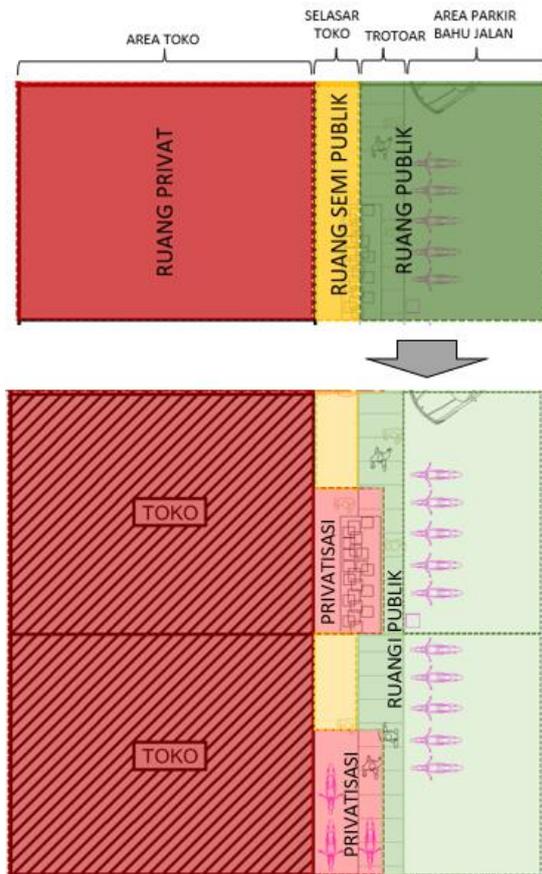
Pada pola ini sebagian teritori publik mengalami perubahan secara fungsional, sehingga ada perluasan (ekspansi) teritori fungsional yang seharusnya berpusat di teritori primer menjadi berkembang sampai ke teritori sekunder dan bahkan ke teritori publik.



Gambar 10. Pola ekspansi teritorial di koridor KBC

Perubahan teritori didasari dari kebutuhan pedagang formal untuk menambah area *display* barang dagangan sehingga terjadi pemanfaatan ruang-ruang potensial di sekitar teritori legal (toko) baik selasar pertokoan maupun jalur pedestrian (trottoar). Ruang-ruang tersebut kemudian dipersepsikan sebagai bagian dari teritori pemilik toko (perseptual) karena secara fungsional telah digunakan untuk mengakomodasi kebutuhan pedagang dalam kegiatan jual beli.

Hal ini sesuai dengan pendapat Widjaja (2007) yang menyatakan bahwa ada tiga spek utama pembentuk teritorialitas, antara lain; legalitas, aktivitas dan persepsi. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka kontrol terhadap ruang ekspansi yang menjadi tempat *display* barang dagangan menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelumnya karena ada teritori baru yang terbentuk, untuk melindungi dan mempertahankan teritorialnya (Altman, 1975).



Gambar 11. Pola privatisasi ruang publik di koridor KBC

Selanjutnya, pola yang kedua adalah perilaku teritorialitas yang mengarah pada privatisasi ruang publik (Gambar 11). Privatisasi ruang publik pada koridor KBC di dominasi oleh pedagang sektor informal (PKL), sebagian lainnya dilakukan oleh tukang parkir, pegawai dan pengunjung toko. Privatisasi ruang publik disini maksudnya adalah penggunaan atau penguasaan ruang publik demi kepentingan individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu.

Fenomena privatisasi ruang publik pada koridor KBC Jl. A.A, Gede Ngurah seperti yang digambarkan pada Gambar 11 tersebut umumnya bersifat sementara, namun dilakukan secara berulang pada lokasi yang sama. Pedagang Kaki Lima (PKL) cenderung memilih area pedestrian (trotoar) di sekitar toko yang tidak beroperasi atau kosong. Besaran ruang yang di privatisasi mencakup hingga setengah badan pedestrian (trotoar). Dengan demikian selasar toko yang semestinya juga menjadi ruang sirkulasi semi publik pengunjung pertokoan juga ikut menjadi bagian dari ruang yang diprivatisasi.

Selain untuk area berjualan PKL, privatisasi ruang publik pada lokasi penelitian juga mengarah pada penggunaan area selasar pertokoan dan bagian jalur pedestrian sebagai area parkir pihak-pihak tertentu, seperti tukang parkir, pegawai toko hingga pengunjung toko. Meskipun bahu jalan juga telah dialokasikan sebagai area parkir, namun kondisinya yang kurang teduh menyebabkan selasar toko dan trotoar menjadi pilihan untuk berubah fungsi menjadi area parkir "privat".

Ruang-ruang yang terbentuk dari fenomena-fenomena yang telah dipaparkan tersebut telah membentuk ruang teritori baru bagi pelakunya. Berdasarkan hasil observasi lapangan, baik ekspansi teritorial maupun privatisasi ruang publik yang terjadi di jalur pedestrian Jl. A.A. Gede Ngurah terbentuk dengan penggunaan simbol kepemilikan atau penandaan berupa barang atau penempatan benda-benda tertentu (Halim, 2005).

Teritori tersebut tersusun dari elemen pembentuk ruang yang disebut *semi-fix element*, yaitu elemen yang posisinya mudah untuk digeser maupun dipindahkan serta bersifat tidak permanen (Sativa et al., 2017). Hal ini dikarenakan, ruang teritori yang terbentuk hanya bersifat sementara, tidak selalu terjadi sepanjang waktu. Contohnya saat tutup toko, barang dagangan yang awalnya ditata di sekitar trotoar akan dimasukkan kembali ke toko. Begitu juga barang-barang dagangan PKL maupun kendaraan yang diparkirkan di selasar toko dan trotoar akan dibawa pulang kembali saat selesai berkegiatan.

Berdasarkan hasil pemaparan tersebut dapat dipahami bahwa pola teritorialitas yang terjadi di koridor KBC Jl. A.A. Gede Ngurah Kota Mataram merupakan fenomena pergeseran nilai ruang pada area bersifat publik maupun semi publik. Teritori primer yang memiliki karakteristik penggunaan secara eksklusif (Altman, 1975) meluas hingga ke area yang tidak semestinya dan mengambil hak-hak publik, dalam hal ini pejalan kaki.

Pola ini konsisten terbentuk dan dilakukan berulang ditempat yang sama oleh pedagang sektor formal dengan alasan dan motif yang serupa. Sementara untuk perilaku teritorialitas lainnya yakni privatisasi ruang publik, konsistensi hanya terjadi pada penggunaan ruang publik (selasar toko dan jalur pedestrian) yang menjadi tempat berjualan PKL. Sementara

privatisasi selasar toko dan jalur pedestrian untuk kebutuhan parkir cenderung berubah-ubah mengikuti ketersediaan tempat dan tidak selalu dilakukan oleh orang yang sama.

Pada pola privatisasi ruang publik ini hanya ada perubahan sifat ruang, yaitu publik menjadi privat, tanpa adanya ekspansi teritorial. Meskipun demikian, jika perilaku teritorialitas tidak dikontrol dengan baik maka tetap akan merugikan publik. Sebuah Jalur pedestrian sebagai salah satu ruang publik dibuat untuk pejalan kaki, maka sudah semestinya ruang tersebut harus mudah diakses serta bebas hambatan maupun kontak dengan kendaraan, maupun aktivitas lain yang mengganggu kenyamanan, keselamatan dan keamanan pejalan kaki (Farida dalam Suwarlan, 2020).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada jalur pedestrian KBC Jl. A.A. Gede Ngurah Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa perilaku teritorialitas dapat disebabkan oleh adanya tekanan lingkungan (*environment press*) terhadap kebutuhan atas ruang bagi pedagang sektor formal dan pedagang sektor informal. Sementara sebagian lainnya disebabkan oleh adanya keinginan dengan motif, -motif tertentu, seperti keinginan untuk memarkirkan kendaraan di area yang teduh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua pola teritorialitas yang terbentuk pada objek studi, yaitu ekspansi teritorial dan privatisasi ruang publik. Kedua pola memiliki karakteristik masing-masing yang khas. Pada ekspansi teritorial terjadi perluasan area teritori yang konsisten dan berulang dimana teritori fungsional yang seharusnya berpusat di teritori primer menjadi berkembang membentuk teritori perseptual pada teritori sekunder dan teritori publik. Sementara pada privatisasi ruang publik memiliki karakteristik yang khas, yaitu terjadinya pergeseran nilai ruang, dari awalnya bersifat publik menjadi privat dalam periode waktu tertentu. Privatisasi ruang publik yang dilakukan oleh PKL bersifat konsisten dan berulang, sementara privatisasi untuk kebutuhan parkir dapat berubah-ubah dipengaruhi ketersediaan tempat dan tidak selalu dilakukan oleh orang yang sama.

Keberadaan perilaku teritorialitas pada jalur pedestrian berdampak pada berkurangnya ruang

gerak, keleluasaan, kemudahan, kesenangan, kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Dengan adanya klaim ruang yang tidak semestinya maka syarat kelayakan jalur pedestrian tidak lagi terpenuhi, sehingga dibutuhkan solusi penataan dan penertiban pada area-area jalur pedestrian yang disalahgunakan tersebut. Diperlukan peran pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan juga penelitian lanjutan untuk memberikan gambaran mengenai jalur pejalan kaki yang ideal pada kawasan pusat bisnis dengan aktivitas dan mobilitas yang tinggi seperti pada koridor Kawasan Bisnis Cakranegara di Kota Mataram berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Altman, I. (1975). The Environment and Social Behavior. *Environment And Behavior*, 20(4).
- Halim, D. (2005). *Psikologi Arsitektur: Pengantar Kajian Lintas Disiplin*. Grasindo.
- Indriani, N. K. A. I. P. M. (2018). Proses Terbentuknya Teritorialitas pada Permukiman Padat Penghuni di Kampung Jawa, Denpasar. *RUANG-SPACE, Jurnal Lingkungan Binaan (Space: Journal of the Built Environment)*, Vol.5(No.1), 91. <https://doi.org/10.24843/JRS.2018.v05.i01.p09>
- Iswanto, D. (2006). Pengaruh Elemen Pelengkap Jalur Pedestrian Terhadap Kenyamanan Pejalan. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 5(1), 21–29.
- Purwanto, E. (2014). Privatisasi Ruang Publik dari Civic Centre menjadi Central Business District (Belajar dari kasus Kawasan Simpang Lima Semarang). *Jurnal Tataloka*, 16(3), 153. <https://doi.org/10.14710/tataloka.16.3.153-167>
- Risdian, H., Sari, S. R., & Rukayah, R. S. (2020). Elemen Perancangan Kota Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Ruang Kota Pada Jalan Jendral Sudirman Kota Salatiga. *Modul*, 20(01), 10–17. <https://doi.org/10.14710/mdl.20.01.2020.10-17>
- Sari, A. I. C. (2014). Jalur Pedestrian Adalah Hak Ruang Bagi Pejalan Kaki. *RADIAL: Jurnal Peradaban Sains, Rekayasa, Dan Teknologi*, 2(1), 47–56. <https://media.neliti.com/media/publications/297608-jalur-pedestrian-adalah-hak-ruang-bagi-p-c7305d2c.pdf>
- Suwarlan, S. A. (2020). Identifikasi Jalur Pedestrian Panglima Besar Sudirman Nganjuk Sebagai Koridor Yang Livable. *Lakar: Jurnal Arsitektur*,

3(01), 9–17.
<https://doi.org/10.30998/lja.v3i01.5868>

Tanan, N. (2011). *Fasilitas Pejalan Kaki*. Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan.

Widjaja, P. (2007). *Teritorialitas Domestik Rumah Pada Dua Kampung Kota di Bandung*. ITB.